



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

PRAKARSA Economic Policy Working Paper

Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia

Setyo Budiantoro

Victoria Fanggidae

Wiko Saputra

Ah Maftuchan

Dwi Rani Puspa Artha

PERKUMPULAN PRAKARSA

2013

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Studi	1
BAB 2	KONSEP DAN METODELOGI	2
2.1	Konsep dan Teknik Pengukuran MPI	2
2.2	Keterbatasan Data dan Implementasi MPI di Indonesia	4
2.3	Teknik Menghitung MPI Indonesia	6
2.4	Data	6
BAB 3	ANALISIS MPI DALAM KONTEKS INDONESIA	7
3.1	Perbandingan MPI dengan beberapa Indikator Kemiskinan	7
3.2	Karakteristik MPI menurut Desa-Kota	7
3.3	Karakteristik MPI menurut Sektor Usaha	9
3.4	Intesitas Kemiskinan menurut MPI	9
3.5	MPI menurut Propinsi	10
3.6	Perbandingan MPI dengan Indikator Kemiskinan Nasional menurut Propinsi	11
3.7	Hubungan MPI dengan HDI	12
3.8	Hubungan MPI dengan Tingkat Kesejahteraan Daerah	13
BAB 4	MPI DAN ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN DI INDONESIA	14
4.1	MPI sebagai Indikator Holistik dan Berkeadilan	14
4.2	MPI dalam Skema Pembangunan Nasional dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan	14
4.3	MPI dalam Skema Pembiayaan (Kebijakan Fiskal) Pusat dan Daerah	16
4.4	Implementasi MPI dalam Skema Pembangunan Daerah	16
	DAFTAR PUSTAKA	17
	LAMPIRAN	18

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan studi tentang kemiskinan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam analisis Human Development Report (HDR) yang diajukan oleh United National Development Program (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan baru melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010.

Berbeda dengan metode pengukuran kemiskinan yang selama ini berbasis pendapatan atau konsumsi. MPI melihat struktur kemiskinan lebih luas bukan sekedar pendapatan atau konsumsi tapi mendefinisikan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Konsep ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Amartya Sen, yang menyebutkan bahwa kemiskinan itu harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi (Sen, 1981; Sen, 2000).

MPI meliputi tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan. Ada sepuluh indikator yang lebih komprehensif atau lebih adil dalam mengukur kemiskinan. Dan indikator yang ditetapkan dalam MPI merupakan cakupan dari tujuan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Cakupan ini menjadi lebih bijaksana bagi studi-studi kemiskinan. Bagi UNDP menjadi lebih holistic dalam melihat dimensi kemiskinan yang terus mengalami pergeseran akibat perubahan struktur pembangunan secara global. Dan menjadi dasar dalam strategi penanggulangan kemiskinan secara global.

Bagi Indonesia, MPI merupakan suatu terobosan baru dalam memotret kondisi kemiskinan. Dengan MPI, pemerintah akan mendapatkan gambaran kemiskinan yang lebih riil dibandingkan pola pendekatan konsumsi yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). MPI juga akan lebih objektif dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sehingga bisa menjadi indikator bagi penetapan asumsi makro ekonomi Indonesia ke depan.

1.2. TUJUAN STUDI

Tujuan dari studi adalah:

1. Menjelaskan bagaimana konsep dan perhitungan MPI
2. Menganalisis MPI dalam konteks Indonesia
3. Membandingkan MPI dengan pendekatan kemiskinan lain di Indonesia
4. Menganalisis hasil perhitungan MPI di Indonesia
5. Menjelaskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam konteks MPI

2.1. KONSEP DAN TEKNIK PENGUKURAN MPI

MPI pertama kali dikembangkan oleh OPHI dengan UNDP pada tahun 2010. Dimana tujuan dari MPI adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistic. Selama ini, indicator secara global yang banyak digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah melalui pendekatan moneter seperti garis kemiskinan dengan batas USD. 1.25 Purchasing Power Parity (PPP), USD. 1.5 PPP atau melalui pendekatan konsumsi dasar (basic need) yang digunakan di Indonesia.

Amartya Sen (1980 & 2000) sudah lama sebenarnya mengkritik pendekatan kemiskinan dengan menggunakan analisis moneter. Menurut Amartya Sen, pendekatan tersebut hanya memotret sebagian kecil dari begitu besarnya persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan saja menyangkut kemampuan daya beli (purchasing power parity), pendapatan atau konsumsi tapi ada dimensi yang lebih luas dari kondisi kemiskinan. Ketika ada sebagian masyarakat tidak bisa akses terhadap pelayanan pendidikan dasar atau kesehatan dasar akibat ketidakmampuan dalam ekonomi maka itu bisa dikatakan miskin. Begitu juga terhadap kualitas dari standard kehidupan seperti rumah yang berlantainya tanah, tidak adanya sanitasi yang baik, sumber energy untuk penerangan dan memasak yang tidak layak, maka ini merupakan bagian dari kemiskinan.

Bagi UNDP, MPI merupakan bagian yang terintegrasi dalam kerangka Millenium Development Goals (MDGs). Dimana setiap indicator MPI merupakan bagian dari target pencapaian MDGs. Timbulnya kekhawatiran secara global dalam penyelesaian masalah kemiskinan merupakan ide awal dari MPI. UNDP melihat bahwa memperluas indicator kemiskinan dan melihat kemiskinan secara multidimensi merupakan strategi awal dalam kerangka penanggulangan kemiskinan global. Selama ini persoalan kemiskinan dijebak oleh cakupan indicator yang sempit sehingga strategi penanggulangan kemiskinan menjadi sempit juga. Ada tiga dimensi yang dirujuk oleh UNDP dan OPHI dalam MPI.

2.1.1. Dimensi Kesehatan

Untuk dimensi kesehatan, MPI mengukur dengan menggunakan dua indicator yaitu gizi dan kematian anak. Pada konsepnya, dua indikator ini dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Indikator gizi, MPI mengukur pada setiap anggota rumah tangga baik itu anak atau orang dewasa. Untuk anak, pengukuran gizi mengacu pada standard MDGs yaitu melalui pendekatan berat badan berbanding usia anak. Anak dikatakan memiliki gizi kurang ketika berat badan berada pada dua atau lebih di bawah standard deviasi rata-rata populasi yang menjadi acuan. Sedangkan untuk orang dewasa, menggunakan pendekatan Body Mass Index (BMI). Dimana seorang dewasa dianggap kurang gizi ketika BMI lebih rendah dari 18.5.

Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak. Secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan. Bisa saja kematian tersebut akibat penyakit atau kekurangan gizi. Penilaian mencakup semua umur anak. Ketika ada rumah tangga yang memiliki kematian anak baik satu, dua atau seterusnya maka rumah tangga tersebut masuk dalam satu poin penilaian dalam MPI.

2.1.2. Dimensi Pendidikan

Ada dua indicator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah (years of schooling) dan akses terhadap pendidikan (attendance of school). Dua indicator ini lebih mencerminkan kepada kemampuan masyarakat terhadap akses dasar kesehatan dan bukan mencerminkan kualitas dari pendidikan yang mereka dapat. Lama pendidikan dalam MPI dihitung minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang akses (hadir) dalam pendidikan.

2.1.3. Dimensi Standar Hidup

Standar hidup mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standard dari kehidupan sesuai dengan MDGs. Indikatornya terdiri dari enam indicator. Pertama, air. Seseorang memiliki akses terhadap air minum bersih jika sumber air salah satu jenis berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dilindungi semi atau air hujan, dan itu dalam jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap kekurangan dalam akses terhadap air. Kedua, sanitasi. Seseorang dianggap memiliki akses ke sanitasi, jika rumah tangga memiliki beberapa jenis toilet atau jamban, atau berventilasi baik atau toilet kompos, asalkan tidak dibagi. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan dalam sanitasi. Ketiga, listrik. Seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki akses listrik. Keempat, lantai rumah. Bahan Lantai terbuat dari tanah, pasir atau kotoran dianggap miskin. Kelima, bahan bakar untuk memasak. Seseorang dianggap miskin bila dalam bahan bakar memasak, rumah tangga tersebut menggunakan arang atau kayu. Keenam, kepemilikan aset. Jika sebuah rumah tangga tidak memiliki lebih dari satu radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, dan tidak memiliki mobil maka dianggap miskin. Secara umum indicator MPI dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1.

Dimensi dan Indikator setiap Dimensi dalam MPI



2.1.4. Pengukuran MPI

MPI dihitung menggunakan bobot tertimbang dari dimensi dan indicator. Bobot dari dimensi ditimbang sama yaitu 1/3 masing-masing dimensi. Dan masing-masing indicator dalam dimensi juga ditimbang sama. Sehingga didapatkan bobot indicator sebagai berikut: bobot indicator kesehatan yang terdiri dari dua indicator dinilai sebesar 1/6, bobot pendidikan yang terdiri dari dua indicator dinilai 1/6 dan bobot kualitas hidup yang terdiri dari enam indicator dinilai 1/18.

Setiap orang yang dinilai dalam MPI dilihat dari indicator yang dinilai. Penilaiannya terdiri dari rentang 0-1. Ketika seseorang memenuhi penilaian kemiskinan menurut indicator MPI maka dia dikenakan poin 1. Penilaian akan terus dilakukan pada setiap indicator. Setelah mendapatkan penilaian terhadap sepuluh indicator maka akan dihitung berdasarkan rumus seperti berikut:

$$c_i = w_1I_1 + w_2I_2 + \dots + w_dI_d$$

Dimana $I_i = 1$ jika seseorang kena dalam indicator i dan $I_i = 0$ jika bukan. W_i adalah bobot dari indicator i dengan $\sum_{i=1}^d w_i = 1$

Semua indicator dan dimensi dijumlahkan, lalu dicari rata-rata nilai. Seseorang dikatakan miskin ketika total rata-rata penilaian kecil dari 1/3. MPI adalah perkalian antara multidimensional headcount ratio (H) dengan intensity of poverty (A).

$$H = \frac{q}{n}$$

Dimana q adalah jumlah individu yang dikategorikan miskin secara multidimensional sedangkan n adalah total populasi.

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n c_i(k)}{q}$$

Dimana $c_i(k)$ adalah skor dari individu i dan q adalah jumlah individu yang mengalami kemiskinan multidimensional.

Sehingga $MPI = H \times A$.

2.2. KETERBATASAN DATA DAN APLIKASI MPI DI INDONESIA

Dalam laporan UNDP dan OPHI (2011), mereka memberi kesempatan pada masing-masing Negara untuk mengembangkan indicator MPI sesuai karakteristik kemiskinan yang terjadi di masing-masing Negara. Indikator yang pilih haruslah memenuhi standard yang tertuang dalam komponen MDGs. Bila ada indicator yang telah ditetapkan oleh UNDP dan OPHI tidak terdapat dalam system pendataan di suatu Negara maka bisa dilakukan proksi terhadap indicator tersebut. Contohnya, gizi pada anak bisa diproksikan dengan cakupan imunisasi pada balita.

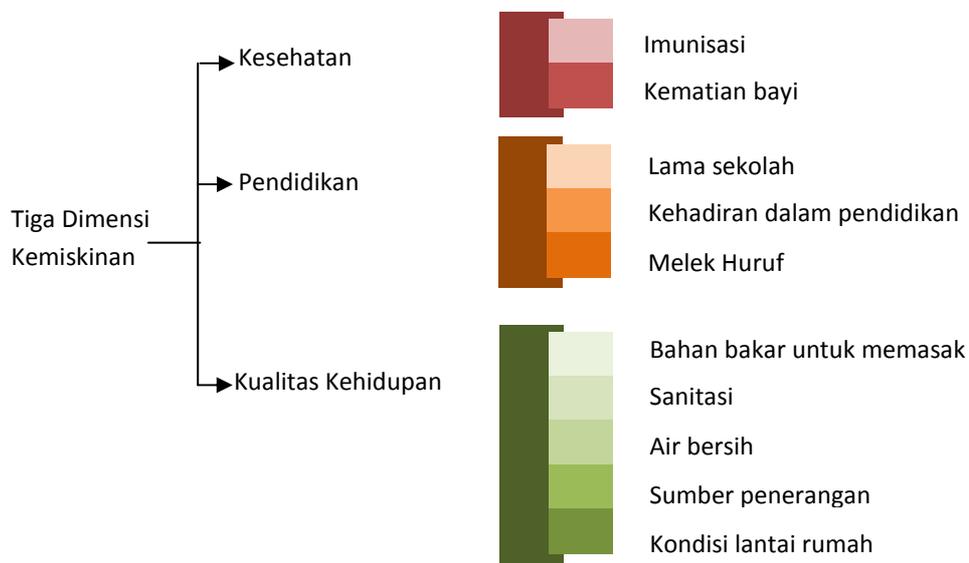
Implementasi MPI di Indonesia dihadapkan pada kendala data dan pemenuhan indicator standard MPI. Saat ini data yang betul-betul baik digunakan dalam menghitung MPI di Indonesia adalah data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa komponen pertanyaan yang ada di Susenas mengarah pada MPI dan MDGs. Susenas rutin dilakukan setiap tahun oleh BPS. Dan system pendataannya cukup professional dengan sampling yang besar dan mewakili setiap daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan Susenas perhitungan MPI dapat dilakukan setiap tahun. Tapi persoalannya adalah ada beberapa indicator MPI standard UNDP dan OPHI yang tidak terdapat dalam data Susenas seperti gizi.

Selain Susenas sebenarnya BPS juga melakukan Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Indonesian Family Life Survey/IFLS). Survey ini bersifat longitudinal dengan sampling yang tetap pada setiap periode survey. Sebenarnya IFLS bagus juga digunakan untuk menghitung MPI. Tapi ada beberapa kelemahan. Pertama, sampling sangat kecil dibandingkan Susenas. Kedua, IFLS tidak dilakukan setiap tahun, ada yang sekali tiga tahun ada juga yang sekali tujuh tahun sehingga sulit untuk menganalisis tren MPI setiap tahun. Ketiga, beberapa indikator dari standard MPI juga tidak ada dalam IFLS. Dari perbandingan tersebut maka untuk analisis MPI di Indonesia, data Susenas lebih kami sarankan sebagai baseline data untuk analisis MPI.

Adanya keleluasaan dalam pengembangan indikator dalam MPI selagi tidak keluar dari konteks MPI dan MDGs menjadikan implementasi MPI di Indonesia agak sedikit berbeda. Secara dimensi tetap menggunakan tiga dimensi seperti kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup. Tapi ada beberapa indikator yang sedikit berubah. Pertama, dimensi kesehatan. Dalam data Susenas tidak ada memasukan indikator gizi. Untuk itu indikator gizi di proksi dengan imunisasi. Perubahan ini secara konsep sedikit jauh tapi keterbatasan data Susenas menjadikan indikator ini digunakan dalam MPI. Pilihan imunisasi cukup mewakili dalam konteks MDGs. Inilah yang menjadi penguatan bagi kami untuk memasukan imunisasi sebagai proksi dari gizi.

Kedua, dimensi pendidikan. Ada satu indikator yang ditambahkan yaitu melek huruf (kemampuan membaca). Bagi kami, indikator ini merupakan bagian dari MDGs sehingga perlu untuk dimasukan sebagai salah satu indikator MPI. Selain itu, ketidakmampuan membaca masih menjadi problema terbesar bagi penduduk miskin di Indonesia. Padahal ini merupakan pelayanan pendidikan dasar yang seharusnya sudah universal menjangkau semua pendidik. Ketiga, dimensi kualitas hidup. Untuk dimensi ini, hanya satu indikator yang tidak kami gunakan yaitu mengenai asset. Dalam Susenas, asset belum begitu cermat menjadi pertanyaan jadi kami keluarkan karena nanti akan bias dalam melihat dimensi dari kemiskinan di Indonesia.

Gambar 2.
Modifikasi Indikator MPI untuk Indonesia



2.3. TEKNIK MENGHITUNG MPI INDONESIA

Di contohkan ada empat rumah tangga yang menjadi sample dalam MPI. Kita akan coba simulasikan perhitungan MPI dengan indicator MPI sesuai konteks Indonesia seperti berikut.

Tabel 1.
Teknik Perhitungan MPI Versi Indonesia

INDIKATOR	INDIVIDU DALAM RUMAH TANGGA SAMPEL				BOBOT
	1	2	3	4	
Ukuran dalam rumah tangga sampel	4	7	5	4	
Kesehatan					
• Kematian anak jika ada anak yang meninggal	0	1	0	1	1/6=0.167
• Imunisasi jika tidak melakukan imunisasi	0	1	0	0	1/6=0.167
Pendidikan					
• Lama sekolah jika kurang dari enam tahun	0	0	1	0	1/9=0.111
• Kehadiran dalam pendidikan jika anak usia sekolah tidak bersekolah	1	1	0	1	1/9=0.111
• Kemampuan membaca jika tidak bisa membaca dan menulis	0	1	1	1	1/9=0.111
Standar Hidup					
• Bahan bakar untuk memasak jika memakai kayu/arang/sampah	0	0	1	0	1/15=0.067
• Sanitasi jika tidak memadai	0	1	1	0	1/15=0.067
• Air bersih jika tidak ada akses terhadap air bersih	0	0	0	0	1/15=0.067
• Sumber penerangan jika tidak menggunakan listrik	1	1	1	1	1/15=0.067
• Lantai rumah jika terbuat dari tanah/kayu/	0	1	0	1	1/15=0.067
Skore (c1)	0.178	0.697	0.423	0.523	
Apakah masuk kategori miskin MPI (c1 ≥ 1/3 = 0.333)	No	Ya	Ya	No	
Sensor score (c1)	0	0.697	0.423	0.523	

Skor setiap orang dalam rumah tangga contoh rumah tangga 1: $c1 = \left(1 \times \frac{1}{9}\right) + \left(1 \times \frac{1}{15}\right) = 0.178$

Multidimensional Headcount Rasio (H) = $\frac{7+5+4}{4+7+5+4} = 0.800$

Intensitas of Poverty (A) = $\frac{(0 \times 4) + (0.697 \times 7) + (0.423 \times 5) + (0.523 \times 4)}{7+5+4} = 0.5679$

MPI = H x A = 0.800 x 0.5679 = 0.4543

2.4. DATA

Untuk studi ini, data perhitungan MPI di Indonesia menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010. Data ini menjadi data dasar dalam mengembangkan MPI di Indonesia. Karena data Susenas ada setiap tahun maka analisis MPI di Indonesia dapat dibuat setiap tahun sehingga kelihatan tren perkembangan MPI di Indonesia

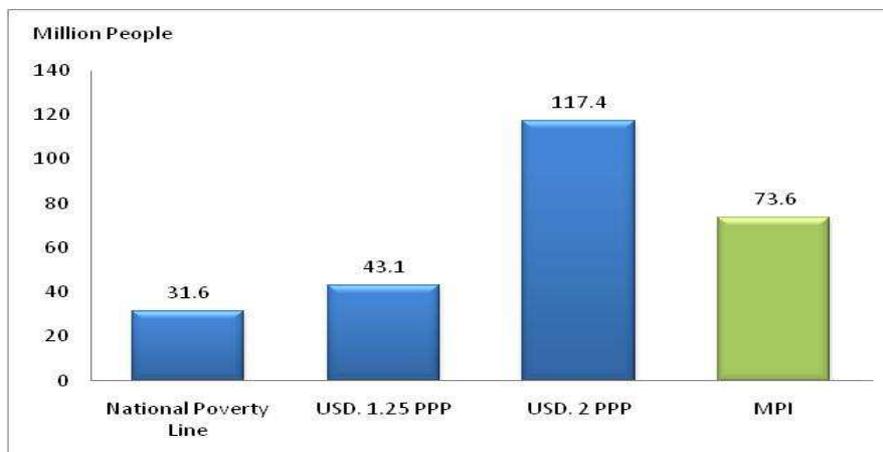
ANALISIS MPI DALAM KONTEKS INDONESIA

3.1. PERBANDINGAN MPI DENGAN BEBERAPA INDIKATOR KEMISKINAN

Ada beberapa indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia seperti National Poverty Line yang dihitung oleh BPS dengan menggunakan pendekatan konsumsi (basic need), selanjutnya ADB menggunakan pendapatan perkapita yang dikonversi dengan Purchasing Power Parity (PPP) dengan batas garis kemiskinan USD. 1.25 PPP dan USD. 2 PPP. Dengan memakai garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,6 juta jiwa. Bila indikator ADB dengan USD. 1.25 PPP maka jumlah penduduk miskin meningkat mencapai 43,1 juta jiwa dan akan meningkat mencapai 117,4 juta jiwa bila menggunakan USD. 2 PPP. Kalau menggunakan pendekatan MPI maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 73,6 juta jiwa.

Grafik 1.

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin menurut Indikator Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2010

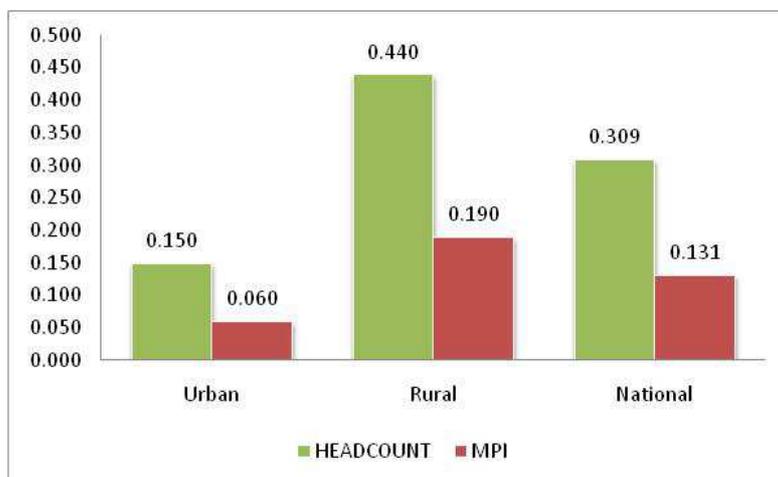


Sumber: BPS, ADB & Susenas 2010 (diolah)

3.2. KARAKTERISTIK MPI MENURUT KOTA – DESA

Dilihat dari karakteristik antara desa dan kota, terdapat kesenjangan dalam angka kemiskinan dan MPI. Untuk desa angka kemiskinan sesuai indikator MPI mencapai 44,0% sedangkan diperkotaan sebesar 15,0% atau ada selisih 29,0%. Sedangkan nilai MPI untuk desa yaitu 0.190 sedangkan kota yaitu 0.060. Ini menunjukkan adanya problema ketimpangan kemiskinan yang terjadi antar kota dan desa.

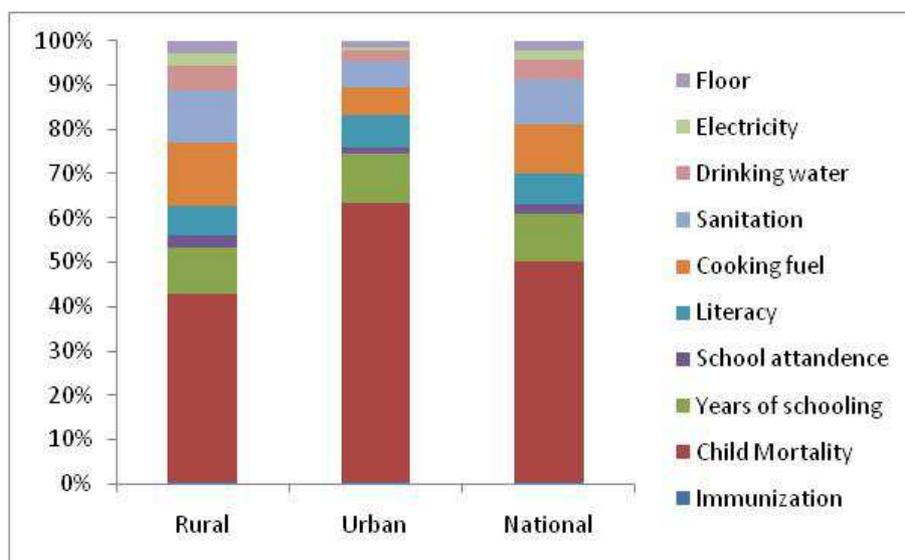
Grafik 2.
Perbandingan Headcount dan MPI menurut Kota dan Desa
di Indonesia, Tahun 2010



Sumber: Susenas 2010 (diolah)

Karakteristik kemiskinan yang dilihat dari distribusi menurut indikator juga menunjukkan perbedaan antara kota dan desa. Walaupun karakteristik masih di dominasi oleh indikator kematian anak yang cukup dominan tapi ada perbedaan nilai dan distribusi indikator lainnya. Untuk kematian anak di pedesaan kontribusinya sebesar 42,7% sedangkan di perkotaan sebesar 63,1% dan nasional sebesar 49,9%. Indikator lain yang dominan di pedesaan adalah bahan bakar untuk memasak (14,2%) dan sanitasi (12,1%). Sedangkan di perkotaan lama pendidikan (11,2%). Sedangkan secara nasional yaitu bahan bakar memasak (11,3%) dan lama pendidikan (10,8%).

Grafik 3.
Distribusi Indikator terhadap MPI menurut
Kota dan Desa, Tahun 2010

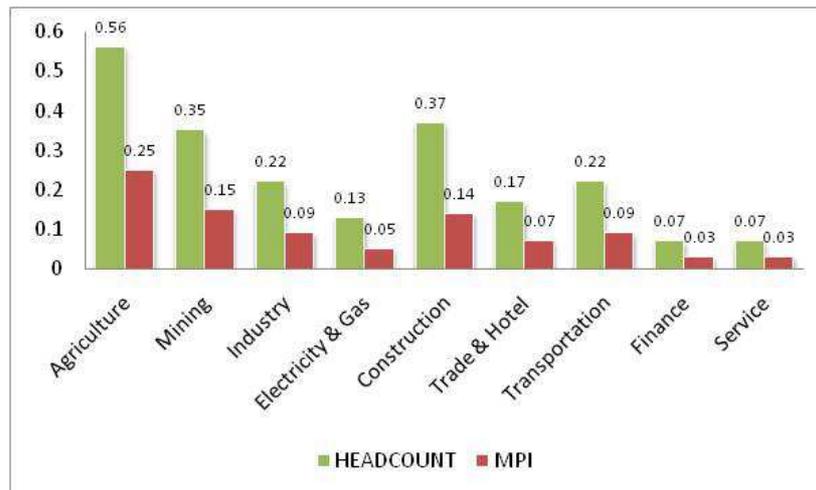


Sumber: Susenas 2010 (diolah)

3.3. KARAKTERISTIK MPI MENURUT SEKTOR USAHA

Bila dikelompokkan menurut sector usaha, angka kemiskinan yang tertinggi berada di sector pertanian dengan nilai headcount sebesar 56,0% dan MPI sebesar 0.25. Sedangkan yang paling rendah berada di sector jasa dan keuangan yang hanya sebesar 7% dengan nilai MPI sebesar 0.03.

Grafik 4.
Perbandingan Headcount dan MPI berdasarkan Sektor di Indonesia, Tahun 2010

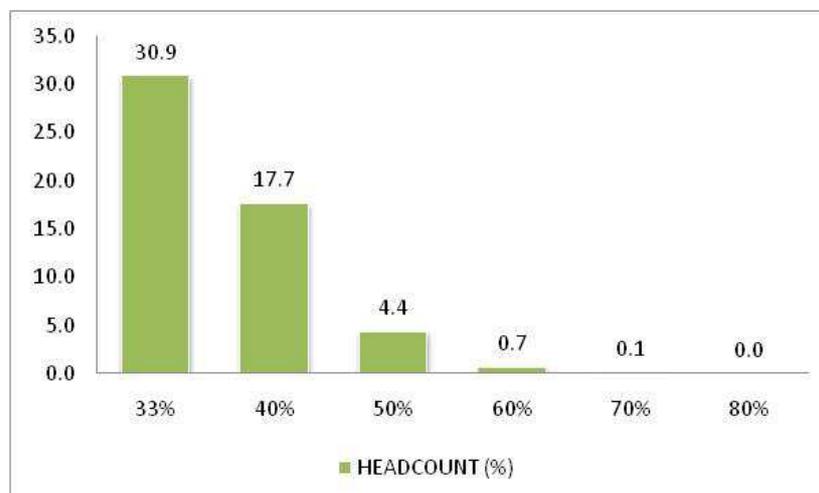


Sumber: Susenas 2010 (diolah)

3.4. INTENSITAS KEMISKINAN MENURUT MPI

Batas garis kemiskinan menurut MPI adalah ketika nilai kecil sama dari 33%. Ketika individu mendapatkan nilai 33% atau lebih kecil maka dia masuk kategori miskin. Untuk melihat kecenderungan intensitas maka bisa dikelompokkan nilai dari 33%-80%. Terlihat bahwa dengan turunnya indicator menjadi 40% maka angka kemiskinan (headcount) menjadi 17,7%. Dan ketika diturunkan lagi menjadi 50%, angka kemiskinan (headcount) menjadi 4,4% dan seterusnya.

Grafik 5.
Intensitas Kemiskinan menurut MPI di Indonesia, Tahun 2010

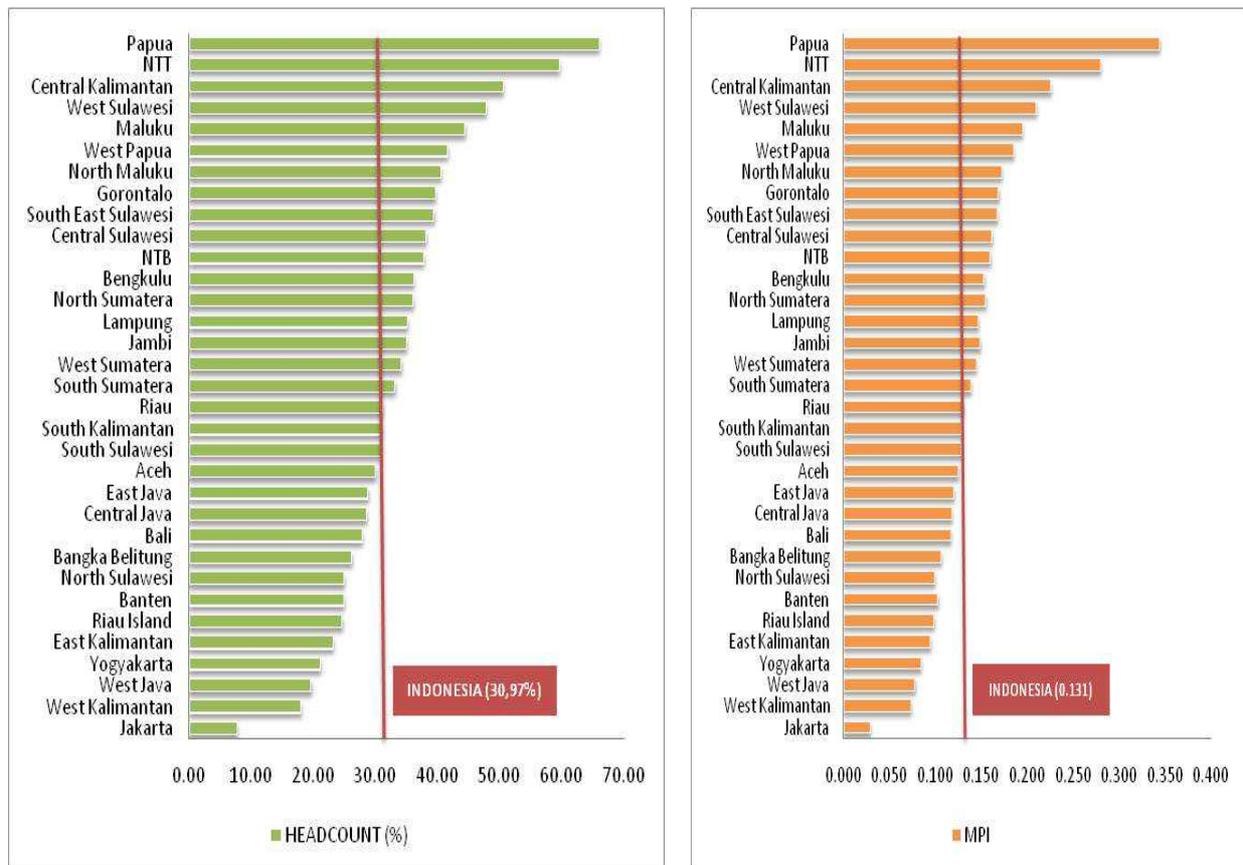


Sumber: Susenas 2010 (diolah)

3.5. MPI MENURUT PROPINSI

Dari hasil pengukuran MPI menurut propinsi menunjukkan headcount (H) yang tertinggi terjadi di Papua dengan persentase kemiskinan mencapai 65,97% dan terendah di Jakarta dengan persentase kemiskinan mencapai 7.66%. Sedangkan untuk MPI, nilai MPI untuk Papua adalah 0.3443 sedangkan MPI untuk Jakarta adalah 0.0289. Sangat jauh terjadi ketimpangan antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia ketimpangan antar daerah terutama dalam hal kemiskinan cukup besar.

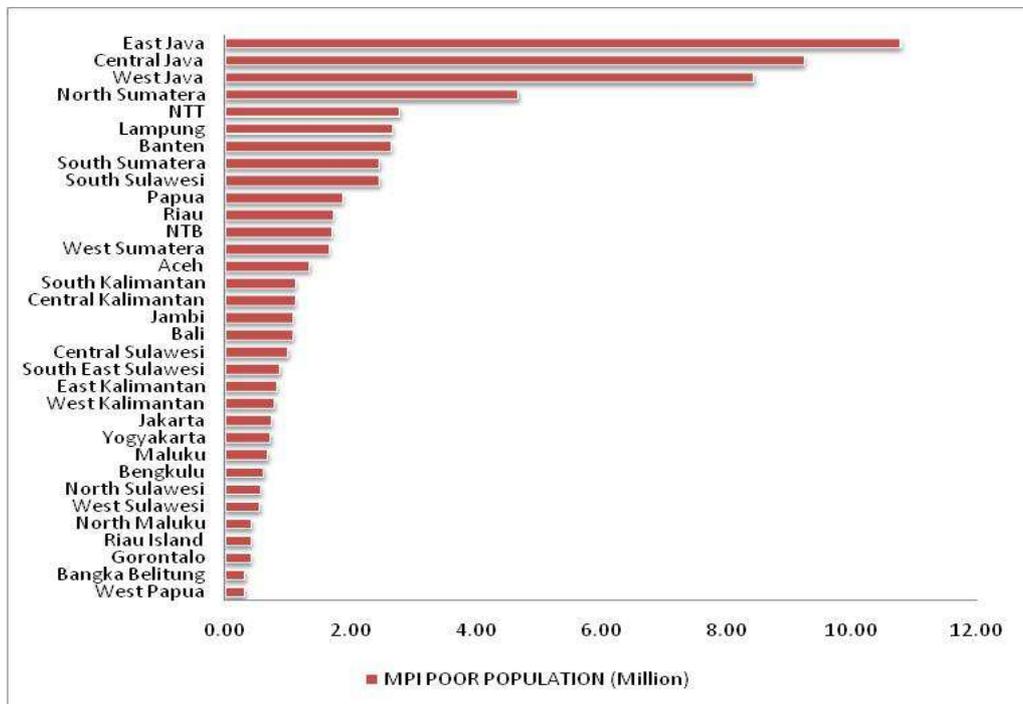
Grafik 6.
Perbandingan Headcount (H) dan MPI menurut Propinsi
di Indonesia, Tahun 2010



Sumber: Susenas 2010 (diolah)

Dari jumlah penduduk miskin menurut MPI, jumlah terbesar berada di Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin mencapai 10,78 juta jiwa diikuti Jawa Tengah sebesar 9,24 juta jiwa dan Jawa Barat sebesar 8,43 juta jiwa. Walaupun secara Headcount (H) dan nilai MPI relative lebih rendah tapi jumlah penduduk ketiga propinsi tersebut cukup besar sehingga jumlah penduduk miskin menurut MPI juga besar. Bila dilihat dari total jumlah penduduk miskin menurut MPI, maka ketiga propinsi tersebut menyumbangkan 38,6% dari total penduduk miskin di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa pemusatan kemiskinan masih berada di Pulau Jawa.

Grafik 7.
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin menurut MPI dan Propinsi
di Indonesia, Tahun 2010



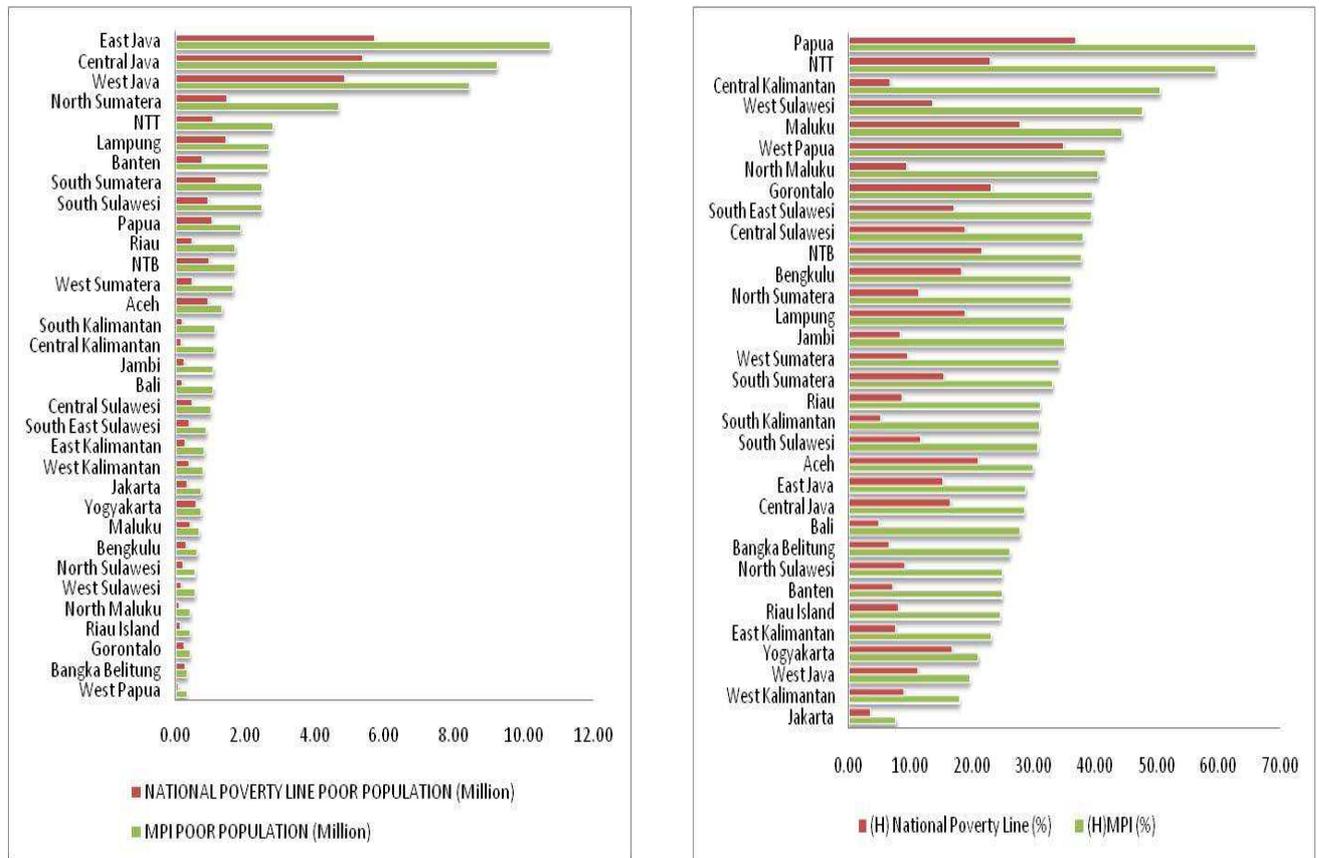
Sumber: Susenas 2010 (diolah)

3.6. PERBANDINGAN MPI DENGAN INDIKATOR KEMISKINAN NASIONAL MENURUT PROPINSI

Ada perubahan struktur kemiskinan bila MPI dibandingkan dengan indikator kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS. Menurut angka kemiskinan ada beberapa propinsi bila menggunakan indikator kemiskinan nasional memiliki angka kemiskinan yang relative rendah seperti Kalimantan Tengah dengan angka kemiskinan sebesar 6,77%. Tapi bila dihitung menggunakan MPI justru angka kemiskinannya melonjak jauh menjadi 50,50%. Hal yang sama juga terjadi di Propinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimanta Selatan dan Sumatera Utara. Atau justru sebaliknya, ada yang angka kemiskinan menurut indikator kemiskinan nasional tinggi tapi hasil perhitungan angka kemiskinan menggunakan MPI justru rendah seperti yang terjadi di Propinsi Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Aceh.

Perbedaan ini merupakan implikasi dari makin luasnya indikator kemiskinan menurut MPI. Ini menunjukkan bahwa keterwakilan model pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS masih lemah memotret persoalan kemiskinan. Justru dengan MPI yang memasukan berbagai dimensi kemiskinan maka akan lebih bisa menjelaskan persoalan kemiskinan. Ada Propinsi yang secara indikator nasional rendah angka kemiskinan karena diukur dari jumlah konsumsi tapi ketika dimensi pendidikan, kesehatan dan standard hidup diperluas ternyata ada persoalan-persoalan kemiskinan yang muncul. Sehingga MPI merupakan alternative terbaik dalam melihat dimensi dan persoalan kemiskinan di setiap propinsi.

Grafik 8.
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan
menurut Indikator dan Propinsi di Indonesia, Tahun 2010



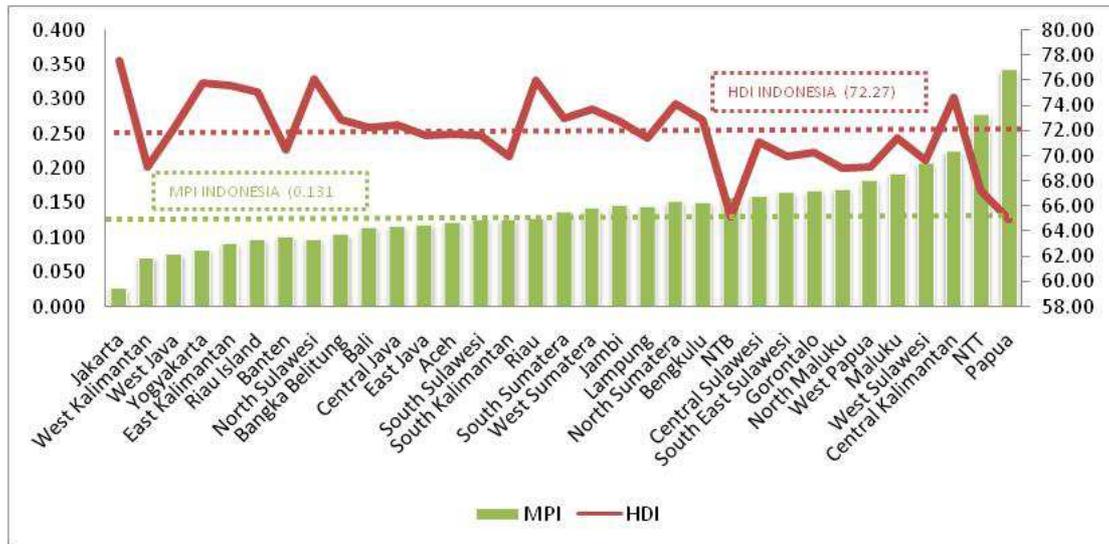
Sumber: Susenas 2010 (diolah)

3.7. HUBUNGAN MPI DENGAN HDI

Bagi UNDP, MPI adalah kelanjutan bagi analisis HDI. Ada hubungan dimensi dan indikator antara MPI dan HDI. Bila HDI menganalisis secara keseluruhan dari populasi mengenai capaian pembangunan manusia maka MPI merupakan alat ukur bagi satu aspek yaitu kemiskinan. Dalam konteks hubungan, logikanya semakin tinggi pencapaian HDI suatu daerah maka semakin rendah pencapaian MPI. Artinya semakin pesat perkembangan pembangunan manusia maka memperkecil munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan.

Hubungan antara MPI dan HDI juga terlihat sesuai dengan kondisi diatas. Dimana propinsi yang memiliki capaian HDI yang tinggi cenderung memiliki angka MPI yang rendah. Walaupun ada beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Banten, NTB dan Kalimantan Tengah yang agak sedikit unik. Di Kalimantan Barat, Banten dan NTB ada kondisi unik, dimana angka capaian HDI tiga propinsi ini rendah tapi MPI juga rendah. Hal yang berbeda terjadi di Propinsi Kalimantan Tengah, dimana capaian HDI tinggi tapi MPI juga tinggi. Ini menunjukkan adanya dimensi-dimensi dari MPI ketika di nilai ternyata memperbesar angka MPI. Disinilah perlu penelitian yang lebih mendalam untuk melihat fenomena-fenomena tersebut.

Grafik 9.
Perbandingan MPI dan HDI menurut Propinsi di Indonesia, Tahun 2010

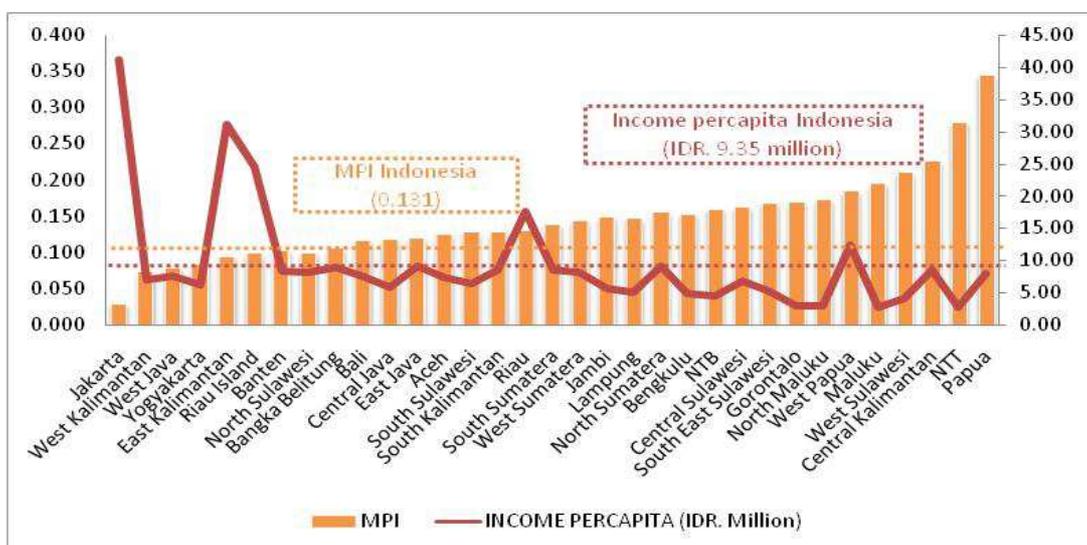


Sumber: Susenas 2010 (diolah)

3.8. HUBUNGAN MPI DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAERAH

Tujuan dari membandingkan MPI dengan tingkat kesejahteraan daerah yang diukur dari pendapatan perkapita (PDRB/kapita) di daerah adalah untuk melihat apakah pembangunan ekonomi yang berindikasi pada peningkatan kesejahteraan mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang lebih holistik dan multidimensi. Ternyata ada beberapa propinsi yang tingkat pendapatan perkapita tinggi tapi MPI juga relatif tinggi seperti Propinsi Kalimantan Timur, Riau dan Papua Barat. Ini mengindikasikan di tiga propinsi tersebut pembangunan ekonomi yang pesat belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan.

Grafik 10.
Perbandingan MPI dengan Pendapatan Perkapita menurut Propinsi di Indonesia, Tahun 2010



Sumber: Susenas 2010 (diolah)

MPI DAN ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI INDONESIA

4.1. MPI SEBAGAI INDIKATOR KEMISKINAN YANG HOLISTIK DAN BERKEADILAN

Mengukur kemiskinan dari pendekatan konsumsi dengan menggunakan pendekatan basic need yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu bentuk penyempitan terhadap persoalan kemiskinan. Kemiskinan bukan saja menyangkut kalkulasi nominal moneter dimana garis kemiskinan dihitung menjadi standard seperti garis kemiskinan nasional (Rp. 162.000/kapita/bulan) tapi kemiskinan merupakan multidimensi aspek.

Ketika seseorang mampu memenuhi hak kebutuhan konsumsi minimal sesuai standard garis kemiskinan nasional tapi satu sisi mereka tidak akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, kondisi rumah yang masih berlantaikan tanah, tidak ada sanitasi yang baik, tidak ada akses terhadap air bersih dan listrik, apakah mereka ini tidak termasuk masyarakat miskin? Bila pemerintah mendefinisikan mereka tidak miskin maka hak-hak kehidupan dan jaminan Negara terhadap perlindungan mereka sudah dirampas.

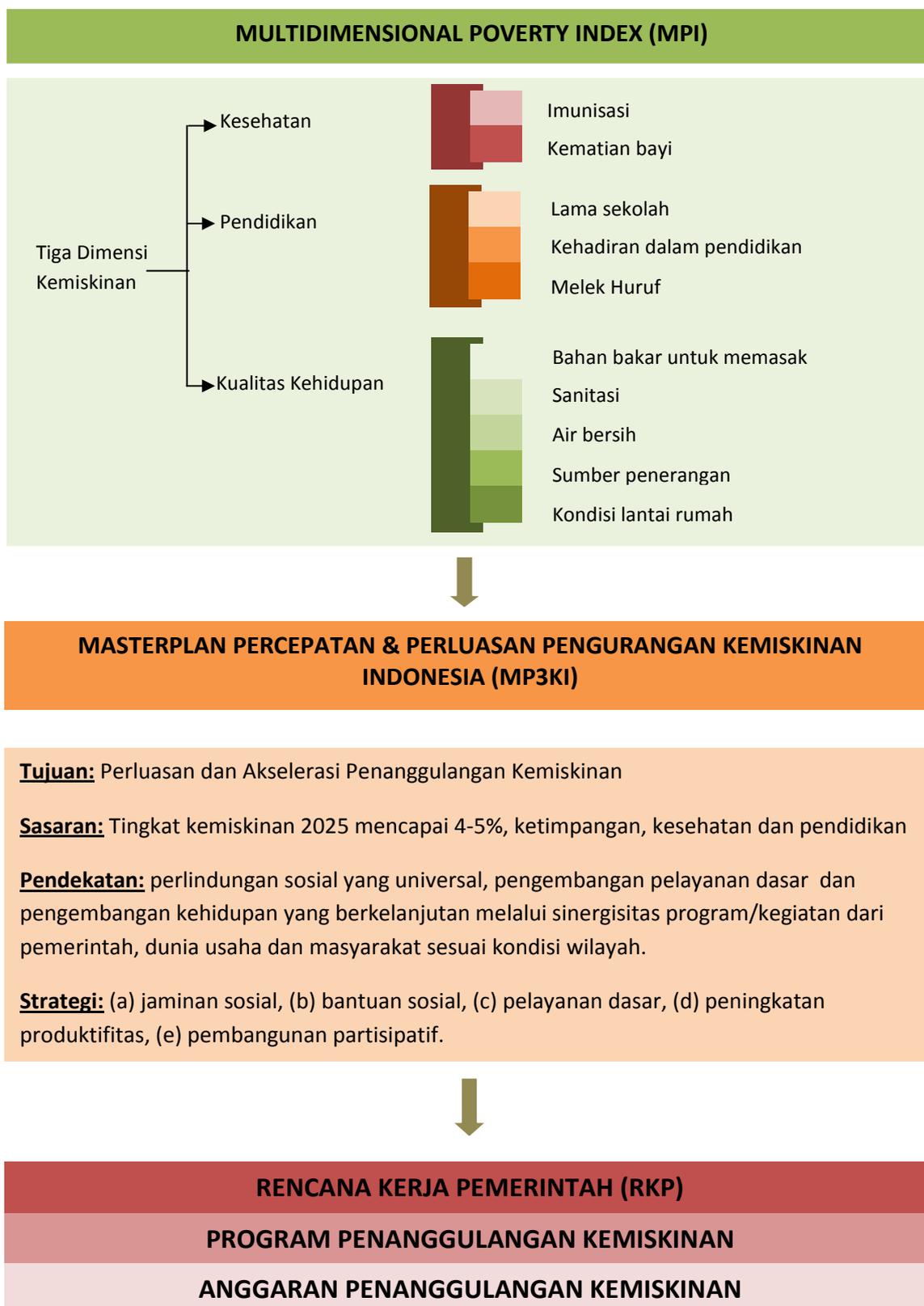
Bagi standard kemanusiaan yang bertujuan untuk keadilan, mereka ini adalah kategori miskin. Ketidakmampuan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar serta rendahnya kualitas kehidupan mereka merupakan wujud kemiskinan. Sehingga MPI sebagai indicator yang bersifat multidimensi dalam melihat fenomena dan persoalan kemiskinan merupakan indicator yang mampu menilai secara adil terhadap kondisi kemiskinan.

Maka seharusnya pemerintah, sebagai penanggung jawab dalam fungsi memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin harus melakukan adopsi standard perhitungan kemiskinan dengan metode MPI. Tiga dimensi dengan sepuluh indicator merupakan cerminan yang lebih holistic dan berkeadilan dalam melihat kemiskinan.

4.2. MPI DALAM SKEMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Secara nasional, pemerintah telah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). MP3KI merupakan kerangka dasar dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jika dilihat dari tujuan, sasaran, pendekatan dan strategi MP3KI, sesungguhnya pemerintah telah menganggap persoalan kemiskinan tersebut bersifat multidimensi. Agar capaian MP3KI tersebut bisa terlaksana maka MPI harus dijadikan dasar dalam menetapkan kemiskinan karena secara prinsip MP3KI sama dengan MPI. Artinya, indicator MPI merupakan prinsip-prinsip dasar dalam MP3KI.

Gambar 3.
Skema MPI, MP3KI dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan



4.3. MPI DALAM SKEMA PEMBIAYAAN (KEBIJAKAN FISKAL) PUSAT DAN DAERAH

Dalam rangka mendukung MPI sebagai agenda dalam penanggulangan kemiskinan nasional, maka perlu system pembiayaan program agar penanggulangan kemiskinan berbasis MPI dapat dilakukan. Dari indicator dalam MPI akan bisa dijabarkan satuan program dan unit cost terhadap masing-masing program. Agar program berjalan efektif maka pelaksanaan program harus dieksekusi pada level kabupaten/kota. Sehingga pembiayaan anggaran dan penyusunan program berada pada level kabupaten/kota sedangkan pusat dan propinsi berfungsi sebagai koordinasi terhadap kegiatan. Skema pembiayaan dapat diatur oleh pusat melalui usulan kabupaten/kota dan nanti ditransfer ke daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan. Skemanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.

Skema Pembiayaan MPI

DIMENSI	INDIKATOR	PROGRAM	SKEMA PEMBIAYAAN			PELAKSANA
			PUSAT	PROPINSI	KAB/KOTA	
Pendidikan	Lama Pendidikan	Bantuan Operasional Sekolah	10%	20%	70%	Kemendikbud & Dinas Pendidikan
Kesehatan	Kematian Anak	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	10%	20%	70%	Kemenkes & Dinkes
Standar Hidup	Sanitasi	Perbaikan sanitas	10%	20%	70%	Kemen PU & Dinas PU/Pemukiman

4.4. IMPLEMENTASI MPI DALAM SKEMA PEMBANGUNAN DI DAERAH

Kabupaten/kota harus menjadi pelaksana utama dalam MPI karena pelayanan paling dekat bagi masyarakat miskin. Pemerintah kabupaten/kota yang mengusulkan program dan jumlah anggaran nanti dikoordinasikan melalui pemerintah propinsi. Pemerintah pusat hanya sebagai pengatur dalam alokasi program dan anggaran serta fungsi pengawasan. Dengan skema ini maka program penanggulangan kemiskinan lebih bisa tertata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alkire, S., and J.E. Foster. 2011. "Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement." *Journal of Economic Inequality*. 9(2):289-314.

Alkire, S., and J.E. Foster. 2011. "Counting and Multidimensional Poverty Measurement." *Journal of Public Economics*. 95(7-8): 476-487.

Alkire, S., M.E Santos, S. Seth and G. Yalonetzky. 2010. "Is the Multidimensional Poverty Index robust to different weights?" OPHI Research in Progress Paper 22a.

Sen Amartya, (2000) *Development as Freedom*, Oxford University Press, New Delhi.

Sen Amartya, (1981), *Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation*, Clarendon Press, Oxford.

UNDP (United Nations Development Programme). 2010. *Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*. UNDP, New York.

LAMPIRAN DATA MPI KABUPATEN/KOTA MENURUT PROPINSI

PROPINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Simeulue	0.3135	0.4095	0.1284
Aceh Singkil	0.4974	0.4320	0.2149
Aceh Selatan	0.3327	0.4193	0.1395
Aceh Tenggara	0.4363	0.4215	0.1839
Aceh Timur	0.4257	0.4298	0.1830
Aceh Tengah	0.2710	0.4280	0.1160
Aceh Barat	0.2183	0.3934	0.0859
Aceh Besar	0.1458	0.3878	0.0566
Pidie	0.3173	0.4101	0.1301
Bireuen	0.2715	0.4049	0.1099
Aceh Utara	0.3469	0.4207	0.1460
Aceh Barat Daya	0.3806	0.4126	0.1570
Gayo Lues	0.4261	0.4236	0.1805
Aceh Tamiang	0.2426	0.4049	0.0982
Nagan Raya	0.2854	0.4016	0.1146
Aceh Jaya	0.2307	0.4231	0.0976
Bener Meriah	0.3621	0.4240	0.1535
Pidie Jaya	0.3143	0.4211	0.1323
Banda Aceh	0.0462	0.3678	0.0170
Sabang	0.1586	0.3852	0.0611
Langsa	0.1524	0.3791	0.0578
Lhokseumawe	0.1859	0.3758	0.0699
Subulussalam	0.5351	0.4415	0.2362

PROPINSI SUMATERA UTARA

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Nias	0.711	0.457	0.325
Mandailing Natal	0.504	0.435	0.219
Tapanuli Selatan	0.442	0.423	0.187
Tapanuli Tengah	0.486	0.419	0.204
Tapanuli Utara	0.326	0.403	0.131
Toba Samosir	0.286	0.426	0.122
Labuhan Batu	0.324	0.445	0.144
Asahan	0.291	0.396	0.115
Simalungun	0.246	0.389	0.096
Dairi	0.418	0.419	0.175
Karo	0.217	0.410	0.089
Deli Serdang	0.205	0.388	0.079
Langkat	0.285	0.411	0.117
Nias Selatan	0.730	0.485	0.354
Humbang Hasundutan	0.396	0.414	0.164
Pakpak Bharat	0.547	0.433	0.236
Samosir	0.465	0.408	0.190
Serdang Bedagai	0.222	0.402	0.089
Batu Bara	0.335	0.412	0.138
Padang Lawas Utara	0.441	0.435	0.192
Padang Lawas	0.502	0.434	0.218
Labuhan Batu Selatan	0.329	0.403	0.133
Labuhan Batu Utara	0.313	0.427	0.134
Nias Utara	0.742	0.470	0.348
Nias Barat	0.754	0.469	0.353
Sibolga	0.153	0.370	0.057
Tanjung Balai	0.132	0.385	0.051
Pematang Siantar	0.101	0.374	0.038
Tebing Tinggi	0.137	0.370	0.051
Medan	0.057	0.374	0.021
Binjai	0.087	0.386	0.033
Padangsidempuan	0.237	0.402	0.095
Gunungsitoli	0.465	0.432	0.201

PROPINSI SUMATERA BARAT

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Kepulauan Mentawai	0.6050	0.4706	0.2847
Pesisir Selatan	0.3812	0.4081	0.1556
Solok	0.4315	0.4292	0.1852
Sijunjung	0.4949	0.4385	0.2170
Tanah Datar	0.3583	0.4245	0.1521
Padang Pariaman	0.4987	0.4303	0.2146
Agam	0.3044	0.4071	0.1239
Lima Puluh Kota	0.3966	0.4132	0.1639
Pasaman	0.4604	0.4339	0.1998
Solok Selatan	0.4513	0.4284	0.1933
Dharmasraya	0.3172	0.4041	0.1282
Pasaman Barat	0.4436	0.4156	0.1844
Padang	0.1571	0.4166	0.0654
Solok	0.1241	0.4002	0.0497
Sawah Lunto	0.2897	0.4180	0.1211
Padang Panjang	0.1068	0.3817	0.0408
Bukittinggi	0.0677	0.3744	0.0253
Payakumbuh	0.1306	0.3705	0.0484
Pariaman	0.2656	0.3990	0.1060

PROPINSI RIAU

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Kuantan Singingi	0.3226	0.4173	0.1346
Indragiri Hulu	0.2589	0.4266	0.1104
Indragiri Hilir	0.5746	0.4383	0.2518
Pelalawan	0.2718	0.4190	0.1139
S I A K	0.2186	0.4001	0.0875
Kampar	0.2355	0.3982	0.0938
Rokan Hulu	0.3310	0.4164	0.1378
Bengkalis	0.2825	0.4026	0.1137
Rokan Hilir	0.3661	0.4225	0.1547
Kepulauan Meranti	0.5256	0.4361	0.2292
Pekanbaru	0.1409	0.3956	0.0557
D U M A I	0.1729	0.4020	0.0695

PROPINSI JAMBI

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Kerinci	0.4145	0.4152	0.1721
Merangin	0.3262	0.4068	0.1327
Sarolangun	0.3178	0.4130	0.1312
Batang Hari	0.3269	0.4207	0.1375
Muaro Jambi	0.2711	0.4091	0.1109
Tanjung Jabung Timur	0.7072	0.4628	0.3273
Tanjung Jabung Barat	0.4552	0.4343	0.1977
Tebo	0.3887	0.4203	0.1634
Bungo	0.2867	0.4088	0.1172
Jambi	0.0782	0.4024	0.0315
Sungai Penuh	0.2809	0.4112	0.1155

PROPINSI SUMATERA SELATAN

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Ogan Komering Ulu	0.2980	0.4143	0.1235
Ogan Komering Ilir	0.4450	0.4236	0.1885
Muara Enim	0.2933	0.4335	0.1272
Lahat	0.3385	0.3992	0.1351
Musi Rawas	0.4597	0.4272	0.1964
Musi Banyuasin	0.3278	0.4074	0.1335
Banyu Asin	0.4025	0.4373	0.1760
Ogan Komering Ulu Selatan	0.4719	0.4470	0.2109
Ogan Komering Ulu Timur	0.4087	0.4216	0.1723
Ogan Ilir	0.3599	0.4202	0.1512
Empat Lawang	0.3739	0.4182	0.1564
Palembang	0.1038	0.4060	0.0421
Prabumulih	0.2882	0.3917	0.1129
Pagar Alam	0.2601	0.3944	0.1026
Lubuklinggau	0.1679	0.3921	0.0658

PROPINSI BENGKULU

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Bengkulu Selatan	0.3490	0.4049	0.1413
Rejang Lebong	0.3551	0.4382	0.1556
Bengkulu Utara	0.3593	0.4147	0.1490
Kaur	0.4605	0.4418	0.2035
Seluma	0.4503	0.4232	0.1906
Mukomuko	0.3540	0.4206	0.1489
Lebong	0.4296	0.4266	0.1833
Kepahiang	0.3119	0.4205	0.1311
Bengkulu Tengah	0.4216	0.4286	0.1807
Bengkulu	0.1041	0.3925	0.0409

PROPINSI LAMPUNG

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Lampung Barat	0.4838	0.4436	0.2146
Tanggamus	0.4229	0.4264	0.1803
Lampung Selatan	0.3154	0.3994	0.1260
Lampung Timur	0.3581	0.4044	0.1448
Lampung Tengah	0.3228	0.4016	0.1296
Lampung Utara	0.3228	0.4245	0.1370
Way Kanan	0.4669	0.4322	0.2018
Tulangbawang	0.3547	0.4109	0.1457
Pesawaran	0.3772	0.4211	0.1588
Pringsewu	0.2922	0.4010	0.1172
Mesuji	0.5930	0.4394	0.2606
Tulang Bawang Barat	0.4371	0.4143	0.1811
Bandar Lampung	0.1297	0.3866	0.0502
Metro	0.1442	0.3825	0.0551

PROPINSI BANGKA BELITUNG

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Bangka	0.2706	0.3978	0.1077
Belitung	0.2660	0.3981	0.1059
Bangka Barat	0.3090	0.4271	0.1320
Bangka Tengah	0.2468	0.4129	0.1019
Bangka Selatan	0.3689	0.4153	0.1532
Belitung Timur	0.3239	0.3982	0.1290
Pangkal Pinang	0.0695	0.3655	0.0254

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Karimun	0.1887	0.3897	0.0735
Bintan	0.2362	0.4017	0.0949
Natuna	0.3051	0.4093	0.1249
Lingga	0.4309	0.4085	0.1761
Kepulauan Anambas	0.3927	0.4108	0.1613
B A T A M	0.1347	0.3863	0.0520
Tanjung Pinang	0.1355	0.3725	0.0504

PROPINSI DKI JAKARTA

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Kepulauan Seribu	0.2800	0.3966	0.1111
Jakarta Selatan	0.0575	0.3674	0.0211
Jakarta Timur	0.0583	0.3748	0.0219
Jakarta Pusat	0.0937	0.3702	0.0347
Jakarta Barat	0.0518	0.3721	0.0193
Jakarta Utara	0.0644	0.3816	0.0246

PROPINSI JAWA BARAT

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Bogor	0.2748	0.3958	0.1088
Sukabumi	0.3038	0.4099	0.1245
Cianjur	0.2831	0.4072	0.1153
Bandung	0.1843	0.3851	0.0710
Garut	0.3184	0.4029	0.1283
Tasikmalaya	0.3052	0.4009	0.1224
Ciamis	0.2340	0.4029	0.0943
Kuningan	0.1772	0.3795	0.0673
Cirebon	0.2355	0.3884	0.0915
Majalengka	0.1936	0.4036	0.0781
Sumedang	0.1652	0.3814	0.0630
Indramayu	0.3231	0.4156	0.1343
Subang	0.2204	0.3929	0.0866
Purwakarta	0.2832	0.4110	0.1164
Karawang	0.2027	0.4031	0.0817
Bekasi	0.2267	0.4177	0.0947
Bandung Barat	0.1932	0.3884	0.0751
Bogor	0.0772	0.3658	0.0282
Sukabumi	0.0629	0.3789	0.0238
Bandung	0.0915	0.3613	0.0331
Cirebon	0.0821	0.3965	0.0326
Bekasi	0.0388	0.3753	0.0146
Depok	0.0481	0.3732	0.0180
Kota Cimahi	0.0372	0.3657	0.0136
Kota Tasikmalaya	0.1301	0.3829	0.0498
Banjar	0.1808	0.3935	0.0711

PROPINSI JAWA TENGAH

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Cilacap	0.2955	0.4069	0.1202
Banyumas	0.3010	0.4158	0.1252
Purbalingga	0.3196	0.4116	0.1315
Banjarnegara	0.4031	0.4257	0.1716
Kebumen	0.3360	0.4152	0.1395
Purworejo	0.3654	0.4208	0.1538
Wonosobo	0.4452	0.4238	0.1887
Magelang	0.3412	0.4160	0.1419
Boyolali	0.3337	0.4195	0.1400
Klaten	0.2093	0.4022	0.0842
Sukoharjo	0.1762	0.3950	0.0696
Wonogiri	0.3684	0.4140	0.1525
Karanganyar	0.2188	0.3924	0.0859
Sragen	0.3134	0.4048	0.1269
Grobogan	0.4618	0.4239	0.1958
Blora	0.4558	0.4330	0.1974
Rembang	0.3234	0.4085	0.1321
Pati	0.2718	0.4155	0.1129
Kudus	0.1178	0.3798	0.0447
Jepara	0.3511	0.4196	0.1473
Demak	0.2548	0.4056	0.1033
Semarang	0.2620	0.4103	0.1075
Temanggung	0.3127	0.4018	0.1257
Kendal	0.3705	0.4145	0.1536
Batang	0.3761	0.4177	0.1571
Pekalongan	0.2507	0.4167	0.1045
Pemalang	0.3021	0.4161	0.1257
Tegal	0.3170	0.4114	0.1304
Brebes	0.4261	0.4149	0.1768
Magelang	0.0834	0.3823	0.0319
Surakarta	0.0504	0.3863	0.0195
Salatiga	0.1005	0.3909	0.0393
Semarang	0.1207	0.3829	0.0462
Pekalongan	0.0892	0.3681	0.0328
Tegal	0.1254	0.3908	0.0490

PROPINSI DI YOGYAKARTA

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Kulon Progo	0.290991	0.396706	0.115438
Bantul	0.184034	0.400639	0.073731
Gunung Kidul	0.342762	0.409915	0.140503
Sleman	0.141146	0.383861	0.05418
Yogyakarta	0.069706	0.369135	0.025731

PROPINSI JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Pacitan	0.3827	0.4290	0.1642
Ponorogo	0.3526	0.4050	0.1428
Trenggalek	0.3854	0.4135	0.1593
Tulungagung	0.2656	0.4088	0.1086
Blitar	0.2692	0.3982	0.1072
Kediri	0.2572	0.4067	0.1046
Malang	0.2679	0.3993	0.1070
Lumajang	0.3098	0.4082	0.1265
Jember	0.3438	0.4210	0.1447
Banyuwangi	0.3398	0.4112	0.1397
Bondowoso	0.5225	0.4401	0.2299
Situbondo	0.4867	0.4391	0.2137
Probolinggo	0.5222	0.4403	0.2299
Pasuruan	0.2897	0.4107	0.1190
Sidoarjo	0.1266	0.3787	0.0480
Mojokerto	0.2005	0.3958	0.0794
Jombang	0.2301	0.4034	0.0928
Nganjuk	0.2875	0.4037	0.1161
Madiun	0.3242	0.4167	0.1351
Magetan	0.2618	0.3982	0.1043
Ngawi	0.4515	0.4286	0.1935
Bojonegoro	0.4078	0.4287	0.1748
Tuban	0.3668	0.4168	0.1529
Lamongan	0.2816	0.4170	0.1174
Gresik	0.1484	0.3849	0.0571
Bangkalan	0.4831	0.4362	0.2107

Sampang	0.6528	0.4555	0.2973
Pamekasan	0.4718	0.4393	0.2072
Sumenep	0.3816	0.4220	0.1610
Kediri	0.1135	0.3722	0.0422
Blitar	0.0801	0.3636	0.0291
Malang	0.0738	0.3869	0.0285
Probolinggo	0.1971	0.3984	0.0785
Pasuruan	0.1349	0.3813	0.0515
Kota Mojokerto	0.0976	0.3905	0.0381
Kota Madiun	0.0633	0.3785	0.0240
Surabaya	0.0794	0.3785	0.0301
Batu	0.1002	0.3766	0.0377

PROPINSI BANTEN

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Pandeglang	0.4212	0.4285	0.1805
Lebak	0.4482	0.4295	0.1925
Tangerang	0.2596	0.4038	0.1048
Serang	0.3753	0.4072	0.1528
Tangerang	0.0602	0.3791	0.0228
Cilegon	0.1411	0.3860	0.0545
Serang	0.2357	0.4028	0.0949
Tangerang Selatan	0.0449	0.3850	0.0173

PROPINSI BALI

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Jembrana	0.2680	0.4025	0.1079
Tabanan	0.2188	0.4116	0.0901
Badung	0.1080	0.3784	0.0409
Gianyar	0.2261	0.3883	0.0878
Klungkung	0.3453	0.4141	0.1430
Bangli	0.4612	0.4369	0.2015
Karang Asem	0.4989	0.4421	0.2206
Buleleng	0.3483	0.4285	0.1492
Denpasar	0.0530	0.3741	0.0198

PROPINSI NUSA TENGARA BARAT

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Lombok Barat	0.4528	0.4260	0.1929
Lombok Tengah	0.5155	0.4316	0.2225
Lombok Timur	0.5059	0.4274	0.2162
Sumbawa	0.3244	0.4216	0.1368
Dompu	0.4209	0.4151	0.1747
Bima	0.3735	0.4077	0.1523
Sumbawa Barat	0.2632	0.4121	0.1085
Lombok Utara	0.6197	0.4581	0.2839
Mataram	0.1467	0.3800	0.0557
Bima	0.2120	0.4080	0.0865

PROPINSI NUSA TENGARA TIMUR

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Sumba Barat	0.5751	0.4731	0.2720
Sumba Timur	0.6118	0.4659	0.2850
Kupang	0.6292	0.4650	0.2925
Timor Tengah Selatan	0.6906	0.4918	0.3396
Timor Tengah Utara	0.6364	0.4838	0.3079
Belu	0.6463	0.4735	0.3060
Alor	0.5540	0.4751	0.2632
Lembata	0.5237	0.4470	0.2341
Flores Timur	0.5020	0.4476	0.2247
Sikka	0.5047	0.4738	0.2391
Ende	0.3763	0.4220	0.1588
Ngada	0.5187	0.4465	0.2316
Manggarai	0.6878	0.4850	0.3336
Rote Ndao	0.5737	0.4540	0.2604
Manggarai Barat	0.6253	0.4573	0.2860
Sumba Tengah	0.8585	0.4990	0.4284
Sumba Barat Daya	0.8693	0.5018	0.4362
Nagekeo	0.5609	0.4483	0.2514
Manggarai Timur	0.7027	0.4777	0.3357
Sabu Raijua	0.7716	0.4707	0.3632
Kupang	0.1930	0.4034	0.0779

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Sambas	0.6063	0.4309	0.2613
Bengkayang	0.4864	0.4391	0.2136
Landak	0.6032	0.4560	0.2751
Pontianak	0.5213	0.4271	0.2226
Sanggau	0.4439	0.4546	0.2018
Ketapang	0.4679	0.4676	0.2188
Sintang	0.5507	0.4623	0.2546
Kapuas Hulu	0.5130	0.4549	0.2334
Sekadau	0.5587	0.4572	0.2555
Melawi	0.5265	0.4694	0.2471
Kayong Utara	0.6992	0.4530	0.3167
Kubu Raya	0.5054	0.4207	0.2126
Pontianak	0.2508	0.3701	0.0928
Singkawang	0.1095	0.3701	0.0405

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Kotawaringin Barat	0.5128	0.4480	0.2297
Kotawaringin Timur	0.3897	0.4279	0.1668
Kapuas	0.5267	0.4468	0.2353
Barito Selatan	0.3528	0.4304	0.1518
Barito Utara	0.3825	0.4478	0.1712
Sukamara	0.3050	0.4159	0.1269
Lamandau	0.3958	0.4246	0.1680
Seruyan	0.2814	0.4187	0.1178
Katingan	0.3805	0.4264	0.1623
Pulang Pisau	0.5154	0.4318	0.2226
Gunung Mas	0.4257	0.4257	0.1812
Barito Timur	0.3220	0.3969	0.1278
Murung Raya	0.4806	0.4525	0.2175
Palangka Raya	0.1395	0.3936	0.0549

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Tanah Laut	0.2740	0.4034	0.1105
Kota Baru	0.3592	0.4210	0.1512
Banjar	0.3480	0.4231	0.1472
Barito Kuala	0.5000	0.4358	0.2179
Tapin	0.2952	0.4171	0.1231
Hulu Sungai Selatan	0.3716	0.4173	0.1551
Hulu Sungai Tengah	0.3328	0.4116	0.1370
Hulu Sungai Utara	0.3469	0.4149	0.1439
Tabalong	0.2656	0.4041	0.1073
Tanah Bumbu	0.2757	0.4076	0.1124
Balangan	0.3731	0.4019	0.1499
Banjarmasin	0.1364	0.3897	0.0532
Banjar Baru	0.1209	0.3771	0.0456

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Paser	0.2281	0.4119	0.0940
Kutai Barat	0.3650	0.4234	0.1546
Kutai Kartanegara	0.2141	0.3933	0.0842
Kutai Timur	0.2239	0.4120	0.0923
Berau	0.2866	0.4106	0.1177
Malinau	0.3098	0.4030	0.1249
Bulungan	0.3441	0.4349	0.1496
Nunukan	0.4078	0.4238	0.1728
Penajam Paser Utara	0.2446	0.3897	0.0953
Tana Tidung	0.4294	0.4194	0.1801
Balikpapan	0.0745	0.3758	0.0280
Samarinda	0.1005	0.3820	0.0384
Tarakan	0.1822	0.3886	0.0708
Bontang	0.0967	0.3916	0.0379

PROPINSI SULAWESI UTARA

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Bolaang Mongondow	0.3552	0.3983	0.1415
Minahasa	0.1515	0.3788	0.0574
Kepulauan Sangihe	0.3723	0.4272	0.1590
Kepulauan Talaud	0.2461	0.3889	0.0957
Minahasa Selatan	0.2288	0.3761	0.0860
Minahasa Utara	0.1530	0.3879	0.0594
Bolaang Mongondow Utara	0.3932	0.3957	0.1556
Siau Tagulandang Biaro	0.1980	0.3805	0.0753
Minahasa Tenggara	0.2612	0.3923	0.1025
Bolaang Mongondow Selatan	0.4723	0.4271	0.2017
Bolaang Mongondow Timur	0.3518	0.4046	0.1423
Manado	0.1436	0.3923	0.0563
Bitung	0.1341	0.3916	0.0525
Tomohon	0.1256	0.3780	0.0475
Kotamobagu	0.2096	0.3902	0.0818

PROPINSI SULAWESI TENGAH

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Banggai Kepulauan	0.4744	0.4312	0.2046
Banggai	0.3339	0.4188	0.1398
Morowali	0.3927	0.4288	0.1684
Poso	0.2352	0.3912	0.0920
Donggala	0.4769	0.4331	0.2065
Toli-Toli	0.3853	0.4221	0.1626
Buol	0.3946	0.4193	0.1655
Parigi Moutong	0.4923	0.4318	0.2126
Tojo Una-Una	0.4307	0.4195	0.1807
Sigi	0.4264	0.4446	0.1896
Palu	0.1346	0.3911	0.0527

PROPINSI SULAWESI SELATAN

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Selayar	0.3476	0.4143	0.1440
Bulukumba	0.3262	0.4125	0.1346
Bantaeng	0.4143	0.4302	0.1782
Jeneponto	0.4283	0.4322	0.1851
Takalar	0.3106	0.4182	0.1299
Gowa	0.3101	0.4282	0.1328
Sinjai	0.3845	0.4301	0.1654
Maros	0.3620	0.4349	0.1574
Pangkajene Dan Kepulauan	0.2618	0.3994	0.1046
Barru	0.2597	0.4050	0.1052
Bone	0.3696	0.4242	0.1568
Soppeng	0.2508	0.3958	0.0993
Wajo	0.3808	0.4169	0.1588
Sidenreng Rappang	0.2239	0.4062	0.0910
Pinrang	0.2122	0.4078	0.0865
Enrekang	0.3525	0.4076	0.1437
Luwu	0.3642	0.4170	0.1519
Tana Toraja	0.3898	0.4302	0.1677
Luwu Utara	0.3553	0.4126	0.1466
Luwu Timur	0.2889	0.4137	0.1195
Toraja Utara	0.3803	0.4314	0.1641
Makassar	0.0822	0.3866	0.0318
Pare-Pare	0.1472	0.3997	0.0588
Palopo	0.1887	0.3919	0.0739

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Buton	0.5215	0.4255	0.2219
Muna	0.4760	0.4325	0.2059
Konawe	0.3973	0.4249	0.1688
Kolaka	0.3774	0.4342	0.1639
Konawe Selatan	0.4011	0.4272	0.1713
Bombana	0.4425	0.4344	0.1922
Wakatobi	0.4620	0.4208	0.1944
Kolaka Utara	0.4239	0.4279	0.1814
Buton Utara	0.4608	0.4216	0.1943
Konawe Utara	0.4706	0.4304	0.2025
Kendari	0.1613	0.4027	0.0650
Bau-Bau	0.2024	0.3957	0.0801

PROPINSI GORONTALO

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Boalemo	0.5000	0.4323	0.2161
Gorontalo	0.4365	0.4330	0.1890
Pohuwato	0.4759	0.4281	0.2037
Bone Bolango	0.3754	0.4153	0.1559
Gorontalo Utara	0.4796	0.4383	0.2102
Gorontalo	0.1656	0.3777	0.0625

PROPINSI SULAWESI BARAT

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Majene	0.4346	0.4270	0.1855
Polewali Mandar	0.4608	0.4240	0.1954
Mamasa	0.5931	0.4578	0.2715
Mamuju	0.4771	0.4535	0.2164
Mamuju Utara	0.4255	0.4328	0.1841

PROPINSI MALUKU

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Maluku Tenggara Barat	0.3840	0.4283	0.1645
Maluku Tenggara	0.3544	0.4146	0.1469
Maluku Tengah	0.3490	0.4154	0.1450
Buru	0.4775	0.4538	0.2167
Kepulauan Aru	0.5782	0.4362	0.2522
Seram Bagian Barat	0.4708	0.4296	0.2023
Seram Bagian Timur	0.5217	0.4463	0.2329
Maluku Barat Daya	0.5897	0.4380	0.2583
Buru Selatan	0.7159	0.4775	0.3419
Ambon	0.0941	0.3830	0.0360
Tual	0.3408	0.4314	0.1470

PROPINSI MALUKU UTARA

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Halmahera Barat	0.4493	0.4146	0.1863
Halmahera Tengah	0.4490	0.4096	0.1839
Kepulauan Sula	0.4257	0.4313	0.1836
Halmahera Selatan	0.5260	0.4378	0.2303
Halmahera Utara	0.4101	0.4206	0.1725
Halmahera Timur	0.3541	0.4313	0.1527
Pulau Morotai	0.5488	0.4393	0.2411
Ternate	0.1289	0.3954	0.0510
Tidore Kepulauan	0.2751	0.4066	0.1119

PROPINSI PAPUA BARAT

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Fakfak	0.3393	0.4527	0.1536
Kaimana	0.3958	0.4263	0.1687
Teluk Wondama	0.4256	0.4581	0.1950
Teluk Bintuni	0.4622	0.4242	0.1961
Manokwari	0.2448	0.4664	0.1142
Sorong Selatan	0.5030	0.4675	0.2351

Sorong	0.4947	0.4447	0.2200
Raja Ampat	0.4802	0.4336	0.2082
Tambrauw	0.7016	0.4692	0.3292
Maybrat	0.6890	0.4500	0.3100
Sorong	0.1976	0.3735	0.0738

PROPINSI PAPUA

Kabupaten/Kota	H	A	MPI
Merauke	0.38741	0.43047	0.16677
Jayawijaya	0.82166	0.53933	0.44315
Jayapura	0.31641	0.42341	0.13397
Nabire	0.32955	0.45150	0.14879
Kepulauan Yapen	0.39791	0.41214	0.16399
Biak Numfor	0.24803	0.41629	0.10325
Paniai	0.88889	0.53664	0.47701
Puncak Jaya	0.90625	0.57775	0.52358
Mimika	0.32741	0.44935	0.14712
Boven Digoel	0.58947	0.46721	0.27541
Mappi	0.51124	0.45591	0.23308
Asmat	0.79167	0.50997	0.40372
Yahukimo	0.87500	0.57661	0.50453
Pegunungan Bintang	0.96234	0.55297	0.53215
Tolikara	0.88542	0.54485	0.48242
Sarmi	0.42932	0.44970	0.19306
Keerom	0.55469	0.44145	0.24487
Waropen	0.54911	0.43990	0.24155
Supiori	0.49215	0.41173	0.20263
Mamberamo Raya	0.81951	0.48694	0.39905
Nduga	1.00000	0.59964	0.59964
Lanny Jaya	0.97368	0.58287	0.56753
Mamberamo Tengah	0.98171	0.55784	0.54763
Yalimo	0.96354	0.56441	0.54383
Puncak	0.60818	0.60818	0.36988
Dogiyai	1.00000	0.56547	0.56547
Intan Jaya	0.98958	0.55548	0.54969
Deiyai	0.96528	0.55216	0.53299
Jayapura	0.19866	0.38897	0.07727

Perkumpulan Prakarsa works to nurture and enhance welfare ideas and initiatives through independent research and knowledge building. We combine research with policy analysis, engagement and communication, transform knowledge into actions in order to create social justice and prosperous society

Perkumpulan PRAKARSA

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E
Rt. 010 Rw. 06 Kel./Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Ph. +62 21 7811 798
Fax +62 21 7811 897
www.theprakarsa.org



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

©2013 by Prakarsa
May 2013
Prakarsa Economic Policy
Working Paper
Multidimensional Poverty Index

